

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Masuk SDN Percobaan, Bayar Rp 3 Juta
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Rabu, 19 September 2018

Masuk SDN Percobaan, Bayar Rp 3 Juta

SOREANG, (PR).-

Sejumlah orangtua siswa SD Negeri Percobaan di Kecamatan Cileunyi mengeluhkan pungutan dari sekolah. Sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah, sekolah malah meminta dana sumbangan pendidikan Rp 3 juta dan iuran bulanan Rp 70.000.

Seorang wali siswa, sebut saja Joni (42), mengaku keberatan dengan pungutan. "Gaji saya kecil makanya saya masukkan anak ke sekolah negeri yang gratis. Ini malah harus bayar iuran dan dana sumbangan," katanya Senin (17/9/2018).

Joni berharap pemkab dan aparat terkait mengusut tuntas pungutan itu. Apalagi, sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Aat Sumirat, guru di SD itu mengakui soal dana tersebut. "Itu bukan pungutan, tapi sumbangan dan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Itu kesepakatan para orang tua siswa yang dikoordinasi komite sekolah," katanya.

Aat menuturkan, sumbangan itu bermula saat SDN Percobaan berubah dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional menjadi sekolah biasa seperti SD lainnya, 2013 lalu. "Waktu RSBI memang boleh ada pungutan karena banyak kegiatan. Saat jadi SDN percobaan, dihapuskan sehingga kami kelabakan. Terpaksa menghapus beberapa program sekolah, tapi ditolak orangtua siswa," katanya.

Dari situlah, kata dia, orangtua siswa melalui komite sekolah sepakat menggalang dana iuran untuk meneruskan pembiayaan program peninggalan RSBI. Kesepakatan berjalan hingga PPDB 2018.

Ketua Komite SDN Percobaan Cileunyi, Pipin Saripin tak menampik soal pungutan itu. Kesepakatan iuran sudah ada sejak masih RSBI, tahun 2009. "Pada PPDB 2018, DSP-nya Rp 3 juta dan bulanan Rp 70.000. Itu hasil musyawarah orangtua siswa sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tak ada yang keberatan," katanya.

Angka Rp 3 juta, menurut Pipin, muncul dari para orangtua setelah disodori RKAS yang memuat kebutuhan pembiayaan program unggulan sekolah tersebut. Namun, nilainya tak mengikat. Tidak diwajibkan bagi yang tak bisa bayar.

"Memang sekolah dapat dana BOS, tapi tidak cukup untuk semua program yang diselenggarakan sekolah. Untuk pengajar, sekolah hanya memiliki 15 guru PNS. Untuk mempertahankan kualitas pendidikan di sana, perlu guru honorer yang perlu diberi kesejahteraan. Dana BOS hanya cukup untuk menggaji petugas kebersihan dan keamanan," katanya. **(Handri Handriansyah)*****